

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Di Indonesia, pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial, maupun hukum termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia. Selain itu juga merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang lebih baik di masa datang untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional, sepanjang waktu dan merata (Badan Ketahanan Pangan, 2010). Indonesia merupakan negara agraris dimana petani padi lebih banyak dibanding petani gandum. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi beras. Dan beras merupakan salah satu panganan pokok di Indonesia.

Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh warga di dunia, terutama di benua Asia. Walaupun umumnya beras yang

dikonsumsi berwarna putih, terdapat juga varietas beras yang memiliki pigmen warna seperti beras merah, beras cokelat dan beras hitam (Iriyani, 2011). Di Indonesia konsumsi beras semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah jika ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi. Hal inilah yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional (Badan Pusat Statistik Nasional, 2009).

Saat ini permasalahan pangan kembali menjadi perbincangan lagi bagi pemerintah setempat. Penyempitan luas lahan ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam kondisi seperti ini ketersediaan pangan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, yaitu Ketersediaan beras. Ketersediaan beras sangat berpengaruh aktif dalam proses kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial (Pranadji (2007) dalam Widodo, 2011). Ketersediaan beras yang cukup ditingkat daerah sudah merupakan suatu prasarat yang mutlak untuk dipenuhi sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah aspek ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup.

Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi seimbang tetap merupakan salah satu program yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Permasalahan kerawanan pangan yang rentan dihadapi anggota

masyarakat miskin termasuk petani di pedesaan sesungguhnya telah mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait lain. Gerakan nasional pengembangan diversifikasi pangan lokal menjadi salah satu alternatif solusi yang strategis dilaksanakan untuk memudahkan akses masyarakat kurang mampu secara ekonomis termasuk petani miskin terhadap pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Akan tetapi, realisasi tujuan yang dicapai ternyata belum menunjukkan hasil yang diharapkan (Dumasari dan Hajoeningtjas, 2014).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumberdaya ekonomi melimpah. Kekayaan sumberdaya ekonomi ini telah dimanfaatkan sejak lama untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan guna menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang selalu berkembang. Perekonomian Provinsi Jawa Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak roda perekonomian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai daerah penyangga pangan nasional dan diutamakan untuk terus ditingkatkan (BPS, 2014). Provinsi Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah terluas (952.525 ha) setelah Provinsi Jawa Timur (1.102.863 ha) memiliki rata-rata produksi beras 9 hingga 10 juta ton per tahun. Salah satu faktor tingginya produksi beras ialah produktivitas lahan, di samping luas lahan atau luas tanam padi. Pada tahun 2010, produktivitas lahan padi di Provinsi Jawa Tengah mencapai 56,13 kuintal/ha, meningkat 0,85 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2011).

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten	Luas panen (ha)	Produksi (kuintal)	Produktivitas (ku/ha)
Kabupaten/Regerency				
1	Cilacap	148,986	872,298	58.55
2	Banyumas	66,210	354,180	53.49
3	Purbalingga	43,479	234,618	53.96
4	Banjarnegara	25,585	146,558	57.28
5	Kebumen	73,924	410,489	55.53
6	Purworejo	57,764	308,281	53.37
7	Wonosobo	32,439	167,846	51.74
8	Magelang	76,842	449,359	58.48
9	Boyolali	50,300	267,787	53.24
10	Klaten	73,962	375,929	50.83
11	Sukoharjo	52,596	392,660	74.66
12	Wonogiri	61,649	374,299	60.71
13	Karanganyar	52,992	331,793	62.61
14	Sragen	97,610	621,446	63.67
15	Grobogan	135,908	848,912	62.46
16	Blora	89,207	504,341	56.54
17	Rembang	44,727	218,416	48.83
18	Pati	105,112	610,045	58.04
19	Kudus	25,166	155,067	61.62
20	Jepara	45,022	249,249	55.36
21	Demak	95,655	623,422	65.17
22	Semarang	42,955	244,102	56.83
23	Temanggung	31,548	191,165	60.59
24	Kendal	45,315	240,414	53.05
25	Batang	45,851	222,957	48.63
26	Pekalongan	43,055	195,471	45.4
27	Pemalang	90,420	454,502	50.27
28	Tegal	65,660	373,507	56.88
29	Brebes	103,189	573,690	55.6
kota/Municipality				
1	Magelang	501	2,621	52.34
2	Surakarta	171	997	58.34
3	Salatiga	1,230	7,498	60.95
4	Semarang	5,915	28,188	47.65
5	Pekalongan	2,117	12,421	58.68
6	Tegal	566	3,078	54.37
Jawa Tengah		1,933,628	11,067,606	57.4

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data Statistik Produktivitas padi sawah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah memiliki total luas panen padi sawah sebesar 1,933,628 ha, untuk produksi sebesar 11,067,606 kuintal dan produktivitas sebesar 57.4 kw/ha

Kabupaten Banyumas merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.635.909 pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2016 sebesar 1.650.625. Pada hakikatnya jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka jumlah permintaan akan pangan juga akan semakin tinggi. Komoditas pangan utama seperti beras merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhannya harus selalu dijaga oleh pemerintah. Untuk meningkatkan ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas, Stok beras berperan sebagai penyangga Keseimbangan (stabilitas) ketersediaan beras apabila terjadi krisis atau bencana yang dapat menggagalkan produksi beras, naik – turunnya jumlah produksi beras yang diproduksi juga sangat berpengaruh dalam memenuhi pasokan beras untuk memenuhi jumlah permintaan beras di Kabupaten Banyumas.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan pangan di Kabupaten Banyumas. Dimana yang setiap tahunnya mengalami kenaikan terus-menerus. Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2016 menurut jenis kelamin.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Lumbir	21 841	21 899	22 348	22 409	44 189	44 308
Wangon	37 598	37 778	37 693	37 876	75 291	75 654
Jatilawang	29 102	29 230	29 588	29 719	58 690	58 949
Rawalo	23 435	23 572	23 472	23 610	46 907	47 182
Kebasen	28 976	29 126	28 600	28 750	57 576	57 876
Kemranjen	32 701	32 950	32 530	32 780	65 231	65 730
Sumpiuh	25 664	25 773	25 511	25 619	51 175	51 392
Tambak	21 455	21 513	21 288	21 346	42 743	42 859
Somagede	16 330	16 428	16 680	16 782	33 010	33 210
Kalibagor	24 202	24 383	23 808	23 987	48 010	48 370
Banyumas	23 183	23 246	23 337	23 401	46 520	46 647
Patikraja	26 695	26 976	26 727	27 008	53 422	53 984
Purwojati	15 805	15 880	15 937	16 013	31 742	31 893
Ajibarang	47 377	47 757	46 816	47 195	94 193	94 952
Gumelar	23 305	23 367	22 743	22 805	46 048	46 172
Pekuncen	32 633	32 748	33 347	33 466	65 980	66 214
Cilongok	58 354	58 998	57 465	58 102	115 819	117 100
Karanglewas	31 529	32 023	30 741	31 225	62 270	63 248
Kedungbanteng	27 537	27 809	26 525	26 789	54 062	54 598
Baturraden	25 278	25 624	25 546	25 897	50 824	51 521
Sumbang	40 460	41 033	40 184	40 754	80 644	81 787
Kembaran	39 686	40 369	39 480	40 163	79 166	80 532
Sokaraja	41 478	42 073	41 693	42 293	83 171	84 366
Purwokerto Selatan	37 590	38 059	37 974	38 451	75 564	76 510
Purwokerto Barat	25 456	25 706	26 436	26 697	51 892	52 403
Purwokerto Timur	28 503	28 579	29 743	29 824	58 246	58 403
Purwokerto Utara	31 210	31 818	32 314	32 947	63 524	64 765
Total	817	824	818	825	1 635	1 650
	383	717	526	908	909	625

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2016

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, diketahui bahwa

pada tahun 2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 17,45 persen. Tingkat kemiskinan ini berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 13,58 persen, dan tingkat kemiskinan Indonesia yang sebesar 10,96 persen. Tingginya angka tingkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyumas masih banyak penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Tingginya tingkat kemiskinan dapat dijadikan indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang berarti pula menurunnya tingkat atau berubahnya pola konsumsi masyarakat (Hasan dan W Saputra, 2008).

Seiring perkembangan jaman dan tentunya kebijakan politik nasional (pemerintah pusat) yang kian lebar membuka keran liberalisasi ekonomi, Banyumas pun mulai bergeser menjadi kota industri. Banyumas sangat ramah investor (baik PMDN maupun PMA). Wal hasil banyak berdiri pabrik-pabrik manufaktur. Di sisi lain membuka lapangan kerja tapi di sisi lain menggusur lahan pertanian, ruang-ruang publik dan tentu saja menggeser budaya (budaya petani menjadi buruh).

Dari tahun ke tahun jumlah lahan pertanian kian menurun, dan tentu saja jumlah petani juga menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2015 luas lahan pertanian yaitu seluas 32.282 Ha sedangkan Tahun 2016 luas lahan pertanian seluas 32.218 Ha. Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Kabupaten Banyumas, Widarso, mengungkapkan, saat ini jumlah petani di Banyumas hanya ada sekira 100 ribu orang. Didominasi generasi tua, setiap tahun jumlahnya selalu menurun.

Ada petani yang meninggal dunia, ada yang berhenti karena faktor usia, sudah tidak mampu lagi mengerjakan sawah, dan pada akhirnya sawah dijual.

Khusus untuk Kabupaten Banyumas yang menjadi lokasi untuk penelitian memiliki luas panen sebesar 66,210 ha, untuk produksi sebanyak 354,180 ton dan produktivitas sebanyak 53,49 ha. Kabupaten Banyumas menempati posisi ke 11 (sebelas) untuk produksi. Meskipun jumlah ini tidak sebanyak kabupaten-kabupaten yang lain, tetapi melihat meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pangan terus bertambah di Kabupaten Banyumas. Dengan menurunnya luas lahan pertanian dan berkurangnya jumlah petani di kabupaten Banyumas. Dapat menyebabkan menurunnya hasil produksi beras di Kabupaten Banyumas.

Pemerintah setempat berupaya memberikan jenis beras yang berkualitas baik untuk dikonsumsi. Peran dari Bulog juga sangat berpengaruh dalam ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas. Terdapat 9 gudang di Bulog Sub divre IV Banyumas yang meliputi daerah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Dari 9 gudang tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, menurunnya luas lahan pertanian, dan menurunnya jumlah petani diperkirakan akan terjadi fluktuasi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas, sehingga hal ini mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian mengenai analisis fluktuasi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas ditinjau dari sisi jenis varietas beras, asal beras, volume konsumsi, volume ketersediaan, dan preferensi konsumen ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Bulog dan instansi terkait sehubungan dengan tercapainya ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimana fluktuasi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas selama periode Tahun 2013-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis bahas, maka tujuan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas ditinjau dari sisi jenis varietas beras, asal beras, volume konsumsi, volume ketersediaan, dan preferensi konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Bulog dan instansi terkait sehubungan dengan tercapainya ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk menganalisis fluktuasi ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas selama periode Tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi peneliti terkait dengan ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas serta sebagai sarana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi pemerintah daerah setempat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pertimbangan atau pemikiran dalam menyusun suatu kebijakan dalam memenuhi ketersediaan beras di daerah tersebut.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

E. Pembatasan Masalah dan Asumsi

1. Analisis ketersediaan beras di Kabupaten Banyumas mengambil data dari Tahun 2013 – 2017.
2. Jenis beras hanya yang dikelola oleh Bulog Sub Divre IV Kabupaten Banyumas.
3. Untuk sumber data preferensi konsumen hanya informan kunci dari Bulog, Disperindag dan Dinas Pertanian di Kabupaten Banyumas.
4. Untuk data sekunder diperoleh dari BPS, Bulog, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
5. Kondisi atau faktor-faktor yang tidak diteliti tidak berpengaruh.